

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sektor publik di Indonesia saat ini sangatlah berkembang pesat, oleh sebab itu menyebabkan adanya tuntutan yang besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pada instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik. Orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan keuangan daerah agar informasi yang diperoleh handal, mengingat bahwa keterandalan merupakan salah satu unsur penting nilai informasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbagai pihak yang bersangkutan (Mardiasmo, 2002). PP No 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa keterandalan laporan keuangan akan terpenuhi jika informasi laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bisa saja relevan, tetapi jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tidak akan mempercayai informasi yang disajikan (Primayana, Atmaja dan Darmawan, 2014).

Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) mengungkap 4.094 temuan yang memuat 5.480 permasalahan dalam pemeriksaan BPK di semester II tahun 2019. Terdapat 971 (18%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern, 1.725 (31%) permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp6,25 triliun, serta 2.784 (51%) permasalahan ketidakhematian, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp1,35 triliun. Selain itu, terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, pada saat pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan

aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp449,45 miliar (7%). (www.bpk.go.id)

Menurut Yosefrinaldi (2013), kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Dapat dikatakan bahwa apabila terdapat sumber daya manusia yang berkualitas maka akan menunjang keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Namun hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Komarasari (2017) yang menunjukkan hasil bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dalam penjelasan PP No. 56 Tahun 2005 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Akan tetapi pada penelitian Jayanti (2018) pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses kegiatan pengawasan keuangan daerah ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selaras

dengan penelitian Bagaswara (2019) yang menunjukkan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penyusunan laporan keuangan sering terjadi kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, oleh karena itu untuk meyakinkan *stakeholder* maupun publik mengenai keakuratan laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah dibutuhkan sistem pengendalian intern yang optimal. Pengendalian intern menurut permendagri No. 60 Tahun 2008 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhi perundang-undangan. Pengendalian intern tidak dimaksudkan untuk meniadakan

semua peluang terjadinya kesalahan atau penyelewengan, akan tetapi sebuah sistem pengendalian intern yang baik dapat menekan terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam batas-batas yang dapat dianggap layak, serta seandainya hal

tersebut terjadi maka akan segera dapat diketahui dan diatasi (Purwono, 2007). Penelitian Setiawati dan Pradana (2018) menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pada Elva (2014) tentang faktor internal dan eksternal terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran merupakan pemekaran dari pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, yang terbentuk pada tahun 2007. Sebagai daerah otonomi baru, tentu saja masih banyak kekurangan di bidang sistem akuntansinya. Pada awal pendirian kabupaten sampai dengan tahun 2009 pencatatan transaksi keuangan masih dilakukan secara manual, yaitu menggunakan program microsoft excel. Hal ini menyebabkan keterlambatan penyusunan laporan keuangan dikarenakan proses pengumpulan informasi dan pengolahan data yang cukup lama. Pada tahun 2009 mulai diterapkan aplikasi SIPKD di Pemda Pesawaran. Penerapan aplikasi ini diharapkan dapat memberi kemudahan bagi user dalam pengelolaan data

keuangan di Pemda Pesawaran. Pada awal penerapan SIPKD di pemda Pesawaran sempat menemui beberapa kendala. Hal ini disebabkan software yang diterapkan belum sepenuhnya dapat menunjukkan aktivitas pengelolaan keuangan (software belum sepenuhnya support). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran mulai diperiksa oleh BPK perwakilan Provinsi Lampung sejak tahun anggaran 2014. Sejak tahun 2014 sampai dengan 2015 Kabupaten Pesawaran selalu mendapatkan WDP, penyampaian LKPD kepada BPK selalu disampaikan melebihi batas waktu yang ditetapkan yaitu tanggal 31 maret berikutnya. Selanjutnya pada tahun 2016 sampai dengan 2019 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran mendapatkan WTP secara berturut turut.

Fenomena yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran terkait pelaporan keuangan yaitu pada belanja barang dan jasa, pertanggungjawaban pelaksanaan belanja perjalanan dinas tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, pada belanja modal pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bantuan sosial, realisasi belanja tidak sesuai dengan usulan dan tidak didukung dengan Laporan pertanggungjawaban seperti yang terjadi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran (IHPS I BPK, Tahun 2015).

Penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan yang belum memperhatikan pedoman penyusunan APBD dengan memadai. Perubahan nilai proyeksi Pendapatan Asli Daerah dari Kebijakan Umum APBD / Prioritas Plafon Anggaran Sementara menjadi anggaran pendapatan yang ditetapkan melalui perda APBD tidak didukung dokumentasi yang jelas, serta metode dan mekanisme penyusunan anggaran pendapatan pada APBDP belum didasarkan pada rujukan yang jelas dan didukung data yang valid. IHPS II BPK, Tahun 2019 (www.bpk.go.id).

Kemudian pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) investigasi BPK RI terdapat adanya indikasi penyimpangan dalam pembangunan gedung dan kamar rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) pesawaran yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 4,8 miliar, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani

Pandra Arsyad mengatakan salah satu pelakunya adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) yang merangkap menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kesehatan Pesawaran. (www.teraslampung.com).

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Bagaswara (2019) yang berjudul Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian, serta penambahan variabel Pengendalian Intern sebagai variabel independen yang mengacu pada penelitian Komarasari (2017). Penambahan variabel yang digunakan dilakukan untuk menemukan hasil yang baru dan memperluas pada penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan meneliti lagi beberapa variabel yang diduga berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan dengan judul: **“Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah, Dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi kasus pada orgaisasi perangkat daerah kabupaten pesawaran)”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian untuk melihat pengaruh variabel tersebut dengan melibatkan Organisasi Perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang mana adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari fenomena dan masalah yang telah di uraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah?

2. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah?
4. Apakah Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pengendalian Intern terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil Penelitian dapat menjadi sumber referensi dan sebagai sumbangan konseptual bagi penelitian selanjutnya khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis IIB Darmajaya.
 - b. Hasil penelitian dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis
Meningkatkan wawasan dan pengetahuan peneliti sehubungan dengan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi,

pengawasan keuangan daerah, dan pengendalian internal terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya bagian akuntansi agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada dihasilkannya laporan keuangan pemerintah daerah yang andal.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi publik dan bahan referensi penelitian selanjutnya yang berminat melakukan penelitian menyangkut masalah yang dibahas.

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini akan disajikan dalam lima bab yang berurutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang berkaitan dengan Kecurangan Akuntansi, Pengendal Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Perilaku Tidak Etis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan bangunan hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang variabel-variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis menyeluruh atas penelitian yang dilakukan. Hasil hasil statistic di interpretasikan dan pembahasan dikaji secara mendalam hingga tercapai hasil analisis dari penelitian

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini penulis membahas secara singkat mengenai kesimpulan berdasarkan hasil analisis data, saran dan keterbatasan dari hasil penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN